

DAFTAR PUSTAKA

Aisyah, I. N. T., Purnomo, E. P., & Kasiwi, A. N. (2020). Analisis Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bantul. *Ijd-Demos*, 2(2), 151–162. <https://doi.org/10.37950/ijid.v2i2.40>

Adnan Panangi, Farida Patitingi, Muhammad Ilhamarisaputra, 2023, Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah atas perbeadaan luas yang tercantum pada sertipikat, Widya Yurtika : Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, Hlm 5

Andi Erwin Hamzah, Andisuryaman, Kahar Lahae, (2023), Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Ulayat Di Kabupaten Teluk Wondana, Papua Law Journal (Papua Law J,-PLJ), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, Hlm 3

Andrianysah, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian dan Teori*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, Jakarta, 2014, hlm. 1.

Anwas (1982). *Ilmu Usaha Tani*. Bandung: Alumni. hal 15

Ari Putra Sudana, Made dan Ketut Wetan Sastrawan. “Proses Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dan Perlindungan Hukumnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Di Pengadilan Negeri Singaraja”. *Kertha Widya Jurnal Hukum*. Vol. 5 No. 2 Desember 2017.

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 10.

Aminda eugine putri, Farida patitinggi, hasbir paserangi, (2021) *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum*, Perlindungan Hukum bagi kreditor terhadap eksekusi jaminan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan.

Bappenas RI. (2019). Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019: Mewujudkan Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian (pp. 7–21).

BPS. (2023). Data Badan Statistik Nasional 2023, “Impor Beras Menurut Negara Asal Utama, 2017-2023.” Diakses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 11:24



BPS. (2023). Data Badan Statistik Nasional 2023, “luas panen dan si padi.” di akses pada tanggal 10 Oktober 2024 pukul 11:14

Bayu, D. J. (2020). *Lahan Pertanian RI berkurang 120 ribu iap Tahun*.

Katadata.Com2.<https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a4215415ce/moeldoko-sebut-lahan-pertanian-ri-susut-120-ribu-hektare-tiap-tahun#:~:text=KetuaHimpunanKerukunan Tani Indonesia,pertanian semakin menyusut setiap tahunnya.&text=Moeldoko mengatakan%2C penyusutan>

CNN. (2020). *Pembangunan Jalan Tol Jokowi Lampau Capaian 5 Presiden Sebelumnya*. Cnnindonesia. Diakses pada 14 Oktober 2023

Dumasari, *Pembangunan Pertanian Mendahulukan Yang Tertinggal*. Pustaka Pelajar, Jakarta, 2020, hal 15

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Anggaran Ketahanan Pangan di 2024 Seperti Fatamorgana, Terlihat Besar Tapi Tak Signifikan*. Di akses pada 29 Februari 2024 Pukul 11:32

Firmansyah, I. 2016. Model pengendalian konversi lahan sawah di dalam DAS Citarum. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor

Ihyamuis, M., Patittingi, F., & Lahae, K. (2022). Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertambangan: Studi Sengketa Tanah Antara Masyarakat Karunsi'e Dongi dan PT Vale Indonesia Tbk. *Amanna Gappa*, 1–14.

Investasi jalan tol. <https://bpjt.pu.go.id/konten/investasi/prinsip-penyelenggaraan>. Diakses tanggal 21 desember 2023 pukul 20.30 Wita.

Imam Koeshwahyono, Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum, *Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, Vol. 1 No. 1 Agustus 2008

Isdiyana Kusuma Ayu. Benny Krestian Heriyawanto, 2018 *Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia*. Volume 2

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Cetakan ke 3., Yogyakarta: Mirra Buana Media.

JalanTol (2019).<https://bpjt.pu.go.id/konten/jalan-tol/sejarah>. Di akses padatanggal 21 Desember 2023 pukul 19.01



ny Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006),

artono, G., & Andraini, F. (2022). *Pemberian Penggantian an Untuk Pembangunan Jalan Tol Kulon Progo Berdasarkan*

Perpres 71 Tahun 2012. *Dinamika Hukum*, 23(2), 126–134.

Kurnianingsih, M., Sartanto, A., & Sukirman, A. N. (2022). Penyelesaian Ganti Rugi Lahan yang Terdampak Proyek Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Pengadilan Negeri Klaten. *Prosiding University Research Colloquium*, 286–295.

Keputusan direktur jendral prasarna dan sarana pertanian Nomor 14 tahun 2022 tentang Petunjuk teknis rekomendasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

Maya Indah, *Perlindungan Hukum Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 130.

MKJI. (1997). Mkji 1997. Departemen Pekerjaan Umum, “Manual KapasitasJalan Indonesia.”

Mulyadi, S., Satino, S., Winarda, R. Z., Mardiyanto, J., Sutarni, N., Kartono, G., Andraini, F., Faridy, F., Hassan, H., Abdurrahman, W., Putra, P. A. W. D., Budiarta, I. N. P., Wijaya, I. K. K. A., Kurnianingsih, M., Sartanto, A., & Sukirman, A. N. (2022). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 3(1), 121–130.

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hal. 123.

Nurahmin, M. F., & Syafaat, M. R. (2021). Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Milik Bersertifikat melalui Mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 4(6), 330–336.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong, *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah, Yogyakarta, 2004, hlm.14

Ofyar Z Tamin. “Konsep Manajemen Kebutuhan Transportasi (MKT) Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Transportasi Perkotaan Di DKI Jakarta” *JurnalPWK-10Vol.10No.1/Maret*.1999

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Lahan Sawah Di lindungi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol



Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021 Tentang laan tanah untuk kepentingan umum

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, , 2008, hlm. 158

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*, cetakan 12. Jakarta: Prenada Media Group. Hal 45.

Prasetyo Firdaus, Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Di Indonesia, Jakarta, 2009 Hlm 3

PU Net. (2021). Dukung Sektor Industri dan Pariwisata Banten, Konstruksi Tol Serang-Panimbang Seleksi 1 Capai 97.68%. PU-Net. Diakses pada 04 Desember 2023

Rahmanto, dkk, 2002. Persepsi Mengenai Multifungsi Lahan Sawah dan Implikasinya Terhadap Alih Fungsi Ke penggunaan Non pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Litbang Pertanian. Bogor.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.58.

Setyorini, Diah et al. (2006). Kompos. Departemen Pertanian. Balittanah.go.id

Suratman, 2015, Hukum Pengadaan Tanah, Malang: Setara Press, H.21

Soegijoko(1997)*Bunga rampai perancangan Pembangunan*, Bandung,yayasan Soegijoko Soegijongko,hal 21

UGM(2017),Menenal lahan sawah dan memahami multifungsu bagi manusia dan lingkungan, <https://geo.ugm.ac.id/2017/09/12/di> aksestanggal 23 Desember 2023 pukul 01.09

Uly YA. 2021. "Mentan: Alih Fungsi Dari Lahan Pertanian Di 2019 Capai 150.000 Hektar." Money Kompas, 2021. Tersedia dari: <https://money.kompas.com/read/2021/03/29/140755726/mentan-alih-fungsidari-lahan-pertanian-di-2019-capai-150000-hektar>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang pangan

Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Valerine, J.L.K, 2009. *Modul Metode Penelitian Hukum Edisi* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hal 4

